

**MODEL KOLABORASI DALAM PENGAWASAN
PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK PENINGKATAN
PAJAK AIR TANAH DI WILAYAH KECAMATAN
KEBAYORAN LAMA**

Disusun oleh:

NAMA : ANDREAS DEWANTO
NPM : 2063001005
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Model kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama
Judul Tesis : Collaboration Model in Monitoring Groundwater Utilization to Increase Groundwater Tax in Kebayoran Lama Sub-district Area

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. Drs. RN Afsdy Saksono, M.Sc

Pembimbing II



Dr. Bambang Giyanto, S.H. M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Administasi Pembangunan Negara
KONSENTRASI : Manajemen Keuangan Negara
JUDUL TESIS : Model kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan
Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak
Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama

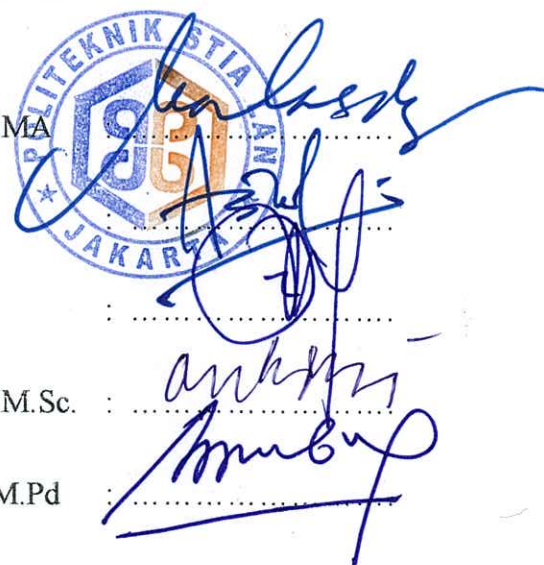
Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangun Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Pukul : 13.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Sekretaris : Dr. Asropi, M.Si.
Anggota : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.
Pembimbing 1 : Dr. Drs. RN Afsdy Saksono, M.Sc.
Pembimbing 2 : Dr. Bambang Giyanto, S.H. M.Pd



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari hasil penelitian tesis ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Desember 2023



Andreas Dewanto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Besar atas berkat rahmat, berkat karunia yang tidak terhingga, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, dalam rangka mendapatkan gelar akademik Magister Terapan (M.Tr.Ap) pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Peneliti merasakan banyak sekali rintangan dan hambatan baik pada masa perkuliahan, dimana hampir selama masa perkuliahan dilaksanakan dengan cara daring, dan pada masa penulisan tugas akhir, serta ditengah kesibukan melaksanakan kewajiban sebagai pegawai. Puji Tuhan berkat do'a dan dorongan semua pihak, karya tulis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berusaha dan berupaya agar tesis ini terselasaikan yaitu:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang juga sekaligus dosen pengajar salah satu mata kuliah yang diambil peneliti;
2. Dr. Drs. RN Afsdy Saksono, M.Sc. selaku pembimbing kesatu sekaligus dosen pada mata kuliah yang diambil peneliti, dimana telah meluangkan banyak waktu, meyumbangkan tenaga dan pikiran ditengah kesibukan mengajar, untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini;
3. Dr. Bambang Giyanto, S.H. M.Pd. selaku pembimbing kedua dan sekaligus dosen salah satu mata kuliah yang diambil peneliti, dimana telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukan mengajar dan sebagai Wakil Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini;
4. Seluruh Dewan Penguji mulai dari sidang proposal tesis, seminar hasil penelitian tesis dan sidang akhir tesis, yaitu : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA, Dr. Asropi, M.Si, dan Dr. Edy Sutrisno, M.Si. yang telah banyak memberikan saran, pendapat dan pemikirannya dalam penyusunan tesis ini;

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, yang telah memberikan kesempatan ijin belajar kepada peneliti sehingga peneliti berhasil mendapatkan gelar M.Tr.AP dari Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang telah berkenan mengizinkan peneliti mendapatkan informasi yang akurat, dan semoga informasi yang disampaikan dapat berguna dalam meningkatkan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah;
7. Seluruh Tim UPPPD Kebayoran Baru, UPPPD Pesanggrahan, UPPPD Pancoran dan UPPPD Kebayoran Lama yang memberikan dukungan luar biasa kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi guna membantu peneliti dalam penyusunan tesis;
9. Orang tua, istri dan anak-anak tercinta serta keluarga besar peneliti yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moral yang tidak ternilai kepada peneliti;
10. Seluruh Staf dan Sekretariat bidang akademik Politeknik STIA LAN Jakarta terutama Ibu Fida Faridanti yang telah dengan sangat sabar dan banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian program studi ini;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu, akhir kata, peneliti berharap Tuhan akan memberikan segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Jakarta, 21 Desember 2023

Peneliti

Andreas Dewanto

ABSTRAK

Model Kolaborasi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Pajak Air Tanah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama

Andreas Dewanto, R.N Afsdy Saksono, Bambang Giyanto

dewanto.andreaz@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kolaborasi dalam pengawasan pemanfaatan air tanah untuk peningkatan penerimaan pajak air tanah di wilayah Kebayoran Lama. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini adalah hambatan Bapenda DKI Jakarta bahwa wajib pajak masih melakukan penyimpangan atas kewajibannya berupa tidak membayar atas pajak air dalam waktu yang telah ditentukan, memanfaatkan air tanah secara obejek dan adanya hambatan dimana rumah yang diperuntukan untuk tempat tinggal dialih fungsikan menjadi tempat usaha sedangkan untuk PAM sendiri mempunyai banyak hambatan dalam pelayanan air bersih seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia mungkin menjadi hambatan dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan air bersih. Sedangkan terkait model kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam pengawasan pemanfaatan pajak air tanah untuk peningkatan penerimaan pajak air tanah di Wilayah Kebayoran Lama diperlukan pemahaman bersama terkait dengan kesepakatan antar pemangku kepentingan dalam cara pandang terhadap tujuan bersama yang hendak dicapai, dan persepsi yang sama dalam proses mewujudkannya, dengan pemahaman bersama yang sudah dibangun, masing-masing pihak dapat memberikan ide apa yang dapat dilakukan sehingga konsensus yang dihasilkan tidak hanya terkait dengan kesepakatan bersama yang harus dicapai tetapi juga bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengambil peran sesuai dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki.

Kata Kunci: Kolaborasi, Peningkatan Pajak, Air Tanah

ABSTRACT

Collaboration Model in Monitoring Groundwater Utilization to Increase Groundwater Tax in Kebayoran Lama Sub-district Area

Andreas Dewanto, R.N Afsdy Saksono, Bambang Giyanto

dewanto.andreaz@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

The purpose of this study is to determine the collaboration model in monitoring groundwater utilization to increase groundwater tax revenue in the Kebayoran Lama area. This research method uses a qualitative method with a total of 9 informants. The results of this study are the obstacles of DKI Jakarta Bapenda that taxpayers still deviate from their obligations in the form of not paying for water tax within a predetermined time, utilizing groundwater objectively and there are obstacles where houses intended for residence are converted into business premises while for PAM itself has many obstacles in clean water services such as limited budgets and human resources may be an obstacle in improving infrastructure and clean water services. While related to the collaboration model carried out by the DKI Jakarta Government in monitoring the utilization of groundwater tax to increase groundwater tax revenue in the Kebayoran Lama Region, a shared understanding is needed related to the agreement between stakeholders in the perspective of the common goals to be achieved, and the same perception in the process of realizing it, with a shared understanding that has been built, each party can provide ideas on what can be done so that the resulting consensus is not only related to the mutual agreement that must be achieved but also how stakeholders can take a role according to their strengths and resources.

Keywords: Collaboration, Tax Increase, Groundwater

STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR BAGAN..... | xii |
| BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 12 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 13 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis..... | 24 |
| 1. Tinjauan Kebijakan | 24 |
| 2. Tinjauan Teoritis | 27 |
| a. Pelayanan Publik..... | 27 |
| b. Keuangan Negara..... | 38 |
| c. Pajak dan Pajak Air Tanah..... | 44 |
| d. Teori Perencanaan Pengembangan Air Tanah | 48 |
| e. Kolaborasi dan Collaborative Governance | 51 |
| f. Konsep Kunci..... | 58 |
| C. Kerangka Berfikir..... | 59 |

| | |
|---|-----|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 62 |
| A. Metode Penelitian..... | 62 |
| B. Teknik Pengumpulan Data..... | 63 |
| C. Pengujian Keabsahan Data..... | 65 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 66 |
| E. Instrumen Wawancara..... | 67 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 68 |
| A. Gambaran Umum..... | 68 |
| B. Faktor-faktor Penghambat Belum Optimalnya Kolaborasi Pengawasan Pemanfaatan Pajak Air Tanah Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama | 75 |
| C. Model Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam Pengawasan Pemanfaatan Pajak Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama | 106 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 125 |
| A. Kesimpulan | 125 |
| B. Saran..... | 126 |
| DAFTAR PUSTAKA | 127 |
| LAMPIRAN..... | 132 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Target dan Penerimaan Pajak Air Tanah Bapenda 2019-2022 | 3 |
| Tabel 1.2 Data SKPD Terbit Tahun 20194..... | 5 |
| Tabel 1.3 Target dan Penerimaan Pajak Air Tanah UPPPD 2019-2022..... | 8 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 19 |
| Tabel 2.2 Karakteristik Penyelenggaraan Pelayanan Publik..... | 38 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 64 |
| Tabel 4.1 Tugas dan Fungsi Kelembagaan | 81 |
| Tabel 4.2 Tabel Pelaku, Pengaruh dan Kepentingan Kolaborasi..... | 112 |

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Data Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta Tahun 2019..... | 3 |
| Gambar 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Jakarta Selatan | 5 |
| Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Wilayah Jakarta..... | 6 |
| Gambar 1.4 Struktur Unit Pemungutan Pelayanan Pajak Daerah..... | 7 |
| Gambar 2.1 Integratif Framework for Collaborative Governance..... | 53 |
| Gambar 2.2 Logic Model Collaborative Governance | 54 |
| Gambar 2.3 Model Collaborative Governance | 55 |
| Gambar 3.1 Triangulasi Data | 66 |
| Gambar 4.1 Tugas dan Fungsi Kelembagaan | 66 |
| Gambar 4.2 Skema Hasil Penelitian | 105 |
| Gambar 4.3 Model Kolaborasi Hasil Penelitian | 124 |

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Berpikir..... | 60 |
| Bagan 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah..... | 74 |



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Air merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan memegang peran sangat vital dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara memiliki otoritas sepenuhnya dalam pengelolaan air dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mencakup langkah-langkah seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melaksanakan kegiatan konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian sumber daya air.

Institusi yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disebut sebagai pengelola sumber daya air. Terkait dengan aspek perpajakan, Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 17 Tahun 2010 mengatur bahwa Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak air tanah dan melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) diberi tugas untuk memberikan bantuan kepada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2022, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin di sektor pengelolaan sumber daya air. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan terkait nilai perolehan air tanah dalam ranah geologi. Sustainable Development Goals (SDGs) menunjukkan bahwa ketersediaan dan pengelolaan air bersih untuk semua orang adalah kebutuhan dasar manusia. Memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan air bersih, dan kebutuhan akan air bersih akan terus meningkat

seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi sebuah daerah. Potensi pendapatan negara dari pajak air tanah sangat besar dalam konteks ini. Meskipun Perusahaan Air Minum Daerah telah berusaha, lembaga ini tidak memberikan air bersih kepada semua orang. Kebutuhan air bersih DKI Jakarta adalah 26,645,6 liter/detik, menurut penelitian Keamanan Keseimbangan Air BPLHD. Kebutuhan air bersih tahun 2015 mencapai 824.784.742 m³/tahun, tetapi pelayanan PAM hanya dapat memenuhi 39%, atau 328.428.535 m³/tahun. Artinya, air tanah menyumbang 61% dari kebutuhan air bersih DKI Jakarta, atau 496.356.207 m³/tahun. Jumlah ini termasuk pelanggan yang tidak tercatat dan sumur-sumur ilegal. Akibatnya, kemungkinan pajak air tanah yang tidak terhitung menjadi semakin penting. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun 2019, cakupan layanan PAM untuk wilayah DKI Jakarta hanya mencapai 28 persen dari jumlah penduduk yang dilayani. Pajak dalam konteks penggunaan air tanah di DKI Jakarta juga ditunjukkan sebagai salah satu pengendalian penggunaan air tanah yang tidak efektif serta merusak lingkungan lewat penurunan permukaan tanah. Pemerintah DKI Jakarta terhadap air tanah memberikan target Penerimaan Pajak, walaupun jumlah target lebih kecil apabila dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, namun apakah penerimaan tersebut memang benar mencerminkan atas pemanfaatan yang digunakan wajib pajak, atau hanya wajib pajak yang terdaftar saja yang membayar, bagaimana dengan yang menggunakan air tanah yang masih belum terdaftar sebagai wajib Pajak.

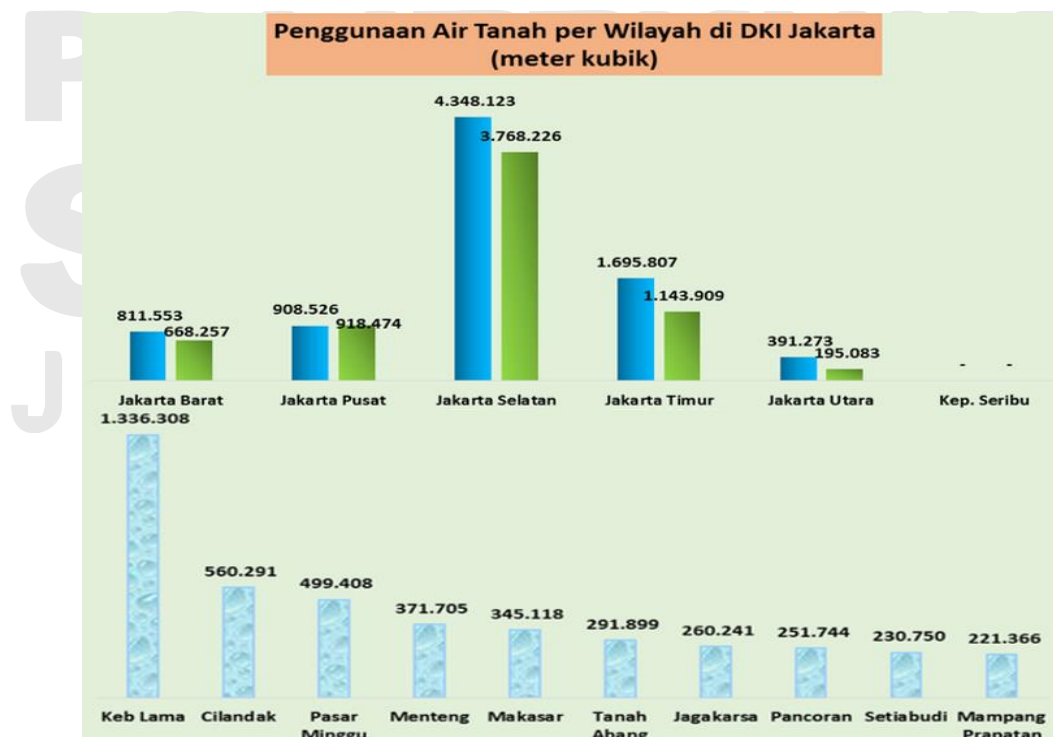
Tabel 1.1 Target dan Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2019 – 2022 Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

| BAPENDA DKI JAKARTA | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|--------|
| TAHUN | Target PAJAK AIR TANAH | Total Realisasi | % |
| 2019 | 110.000.000.000,00 | 68.014.056.602,00 | 61,83% |
| 2020 | 75.000.000.000,00 | 51.337.214.235,00 | 68,45% |
| 2021 | 50.000.000.000,00 | 37.108.499.166,00 | 74,22% |
| 2022 | 100.000.000.000,00 | 8.286.023.915,00 | 8,29% |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Penggunaan air tanah yang tidak efektif berdampak langsung terhadap penurunan permukaan tanah, walaupun tidak dirasakan secara langsung saat ini namun dampaknya akan merugikan masa depan, terutama atas kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang.

Gambar 1.1 Data Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta Tahun 2019



Sumber: (statistik.jakarta.go.id)

Berdasarkan informasi di atas, jelas bahwa wilayah Jakarta Selatan menggunakan air tanah paling banyak di DKI Jakarta. Dengan 1.336.308 m³, Kecamatan Kebayoran Lama menggunakan 35.4% dari total penggunaan air tanah di Jakarta Selatan, sehingga masyarakat Kebayoran Lama hampir sepenuhnya bergantung pada air tanah.

Penggunaan air tanah yang tinggi di Kebayoran Lama tidak hanya menghadirkan risiko terkait penurunan tingkat akuifer, tetapi juga dapat menyebabkan masalah penurunan kualitas air. Pemanfaatan yang berlebihan dapat menyebabkan intrusi air laut, peningkatan kadar salinitas, dan pencemaran air tanah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya air tanah dengan bijaksana, mempromosikan praktik konservasi air, dan mencari alternatif pasokan air yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem air tanah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan data statistik pada tahun 2019 dan dibandingkan dengan data ketetapan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Lama, didapat data sebanyak 139 titik Wajib Pajak yang menggunakan air tanah dan terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah khusus di Kecamatan Kebayoran Lama, dengan jumlah pemanfaatan 796.528 meter kubik, dengan ketetapan Pajak Air Tanah sebesar Rp 9.448.653.509,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah). Berdasarkan data perbandingan tersebut terdapat selisih pemanfaatan air tanah sebesar 539.780 meter kubik, dan estimasi potensi Pajak Air Tanah yang hilang sebesar Rp 6.403.031.897,- pada kecamatan Kebayoran Lama. Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan dilakukan melalui proses perekaman data yang didapat dari Dinas Sumber daya Air berupa pemakaian wajib pajak perbulan, tiap bulannya mereka melakukan pencatatan dan dituangkan dalam Daftar Pencatatan Meter, kemudian dilakukan pelaporan kepada Badan Pendapatan Daerah, setelah itu dari Badan Pendapatan Daerah dikirimkan ke wilayah-wilayah kecamatan.

Tabel 1.2 Data SKPD Terbit Tahun 2019

| Tahun | Kecamatan | Jumlah WP/Titik | Pemanfaatan (m ³) | Ketetapan Pajak (Rp) |
|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| 2019 | Kebayoran Lama | 139 | 796.528 | 9.448.653.509 |

Sumber : Sistem Manajemen Pajak Air Tanah

Kecamatan Kebayoran Lama berada di Wilayah Jakarta Selatan. Awalnya, kebayoran lama adalah wilayah terbarat dari kotamadya Jakarta Selatan, tetapi sekitar tahun 1990an, kebayoran lama dan Pesanggrahan dibagi menjadi dua kecamatan. Seluas 16,72 km², Kecamatan Kebayoran Lama terdiri dari enam (Enam) Kelurahan, yaitu Grogol Utara, Grogol Selatan, Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Pondok Pinang. Wilayah ini merupakan kawasan komersial di wilayah Jakarta Selatan, dengan perumahan elit Pondok Indah, pusat perbelanjaan mewah, dan perkantoran.

Gambar 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Jakarta Selatan 2015-2021

| Kecamatan | Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Jakarta Selatan | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Luas (km ²) | | | Persentase | | |
| | 2015 | 2019 | 2021 | 2015 | 2019 | 2021 |
| Jagakarsa | 24,87 | 24,87 | 24,87 | 17,59 | 17,60 | 17,60 |
| Pasar Minggu | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
| Cilandak | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
| Pesanggrahan | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 9,02 | 9,03 | 9,03 |
| Kebayoran Lama | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 11,83 | 11,84 | 11,84 |
| Kebayoran Baru | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 9,14 | 9,15 | 9,15 |
| Mampang Prapatan | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Pancoran | 8,63 | 8,53 | 8,53 | 6,10 | 6,04 | 6,04 |
| Tebet | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| Setiabudi | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| Kota Jakarta Selatan | 141,37 | 141,27 | 141,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Berdasarkan SK Gubernur Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 171/2007 Tanggal 22 Januari 2007

Sumber : <https://jakselkota.bps.go.id>

Dengan luas wilayah tersebut, tentunya sangat luas dan diperlukan pengawasan yang intensif, selain itu Kecamatan Kebayoran lama pada tahun

2021 memiliki jumlah penduduk 308,5 ribu jiwa dari total 2264,7 ribu jiwa jumlah penduduk di wilayah kota Jakarta Selatan, wilayah kebayoran lama secara geografis merupakan daerah pemukiman yang dimana kebutuhan air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak menutup kemungkinan juga digunakan sebagai tempat usaha, dimana ditemukan dilapangan, karena lokasi strategis berubah fungsi menjadi tempat usaha, contohnya tempat cucian mobil dan motor, kos-kosan dan lainnya yang menunjang perekonomian pemillik tempat.

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan 2019-2021

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (ribu) | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jagakarsa | 413,3 | - | 383,4 |
| Pasar Minggu | 310,6 | - | 304,3 |
| Cilandak | 203,6 | - | 201,6 |
| Pesanggrahan | 223,9 | - | 246,9 |
| Kebayoran Lama | 309,5 | - | 308,5 |
| Kebayoran Baru | 144,1 | - | 139,6 |
| Mampang Prapatan | 147,9 | - | 145,4 |
| Pancoran | 156,4 | - | 168,6 |
| Tebet | 211,9 | - | 221,2 |
| Setiabudi | 143,5 | - | 107,4 |
| Kota Jakarta Selatan | 2264,7 | - | 2226,8 |

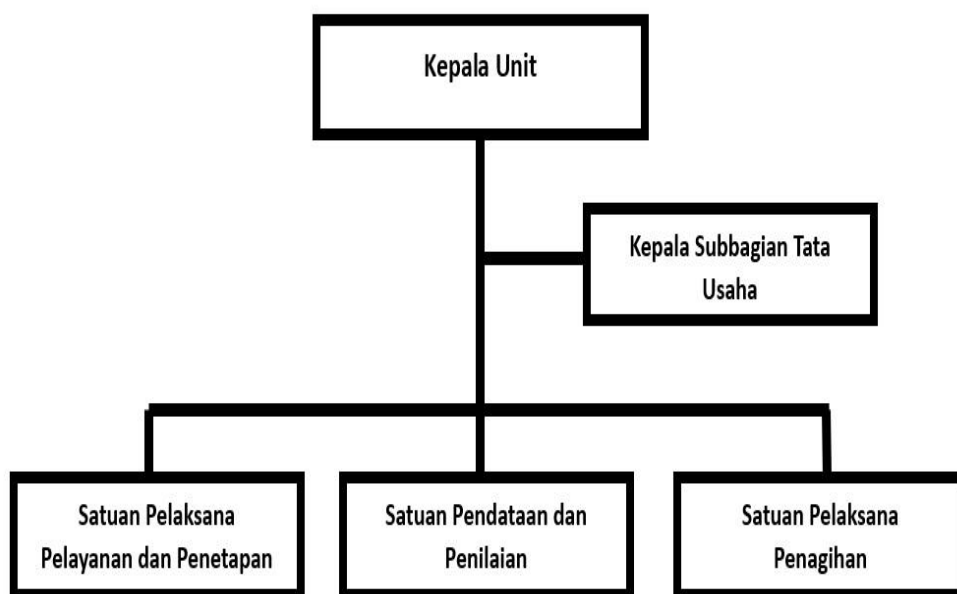
Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

Sumber : <https://jakselkota.bps.go.id>

Wilayah kebayoran Lama Pajak Air berdasarkan data tersebut memiliki potensi pendapatan yang cukup besar dari pemanfaatan air tanah, diperlukan pengawasan yang melibatkan semua pihak-pihak terkait dalam pengawasan pemanfaatan air tanah, walaupun data tersebut mungkin masih adanya pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga. Wilayah kebayoran

lama memiliki Unit Pemungutan Pelayanan Pajak Daerah (UPPPD) Wilayah Kebayoran Lama, yang berada ditingkat kecamatan Kebayoran. UPPPD Kebayoran lama merupakan unit dibawah Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah. Perangkat UPPPD Kebayoran Lama terdiri dari Satu orang Kepala Unit yang dibawahnya terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha dan memiliki 3 (tiga) Satuan Pelaksana, Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan, Satuan Pelaksana Penilaian dan Pendataan, dan Satuan Pelaksana Penagihan, yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Satuan Pelaksana.

Gambar 1.4 Struktur Unit Pemungutan Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama



Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Sumber daya yang memadai secara kualitas dan kuantitas, petugas pajak dengan jumlah personil hanya 15 (lima belas) orang ditambah pegawai Non PNS 5 (lima) orang. Pajak Daerah yang ditangani dalam wilayah kecamatan Kebayoran Lama sebanyak 8 (Delapan) Jenis Pajak antara lain,

Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan sumber daya yang kurang dan tidak di dukung dengan teknologi yang dapat mendeteksi penggunaan air tanah, tentunya dari 8 (delapan) jenis pajak tersebut tidak maksimal dalam menjalankan tupoksi masing-masing perjenis pajaknya, tentunya akan berdampak kepada penerimaan Pajak, khususnya Pajak Air Tanah dimana target penerimaan Pajak Air Tanah sebagai juga sebagai salah satu upaya pengendalian dan tolak ukur pemanfaatan air tanah di wilayah kebayoran lama.

Tabel 1.3 Target dan Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2019 – 2022 Wilayah Kebayoran Lama

| | KEBAYORAN LAMA | | |
|-------|------------------------|------------------|--------|
| TAHUN | Target PAJAK AIR TANAH | Total Realisasi | % |
| 2019 | 8.686.403.000,00 | 6.869.143.668,00 | 79,08% |
| 2020 | 4.127.000.000,00 | 2.564.324.215,00 | 62,14% |
| 2021 | 2.391.000.000,00 | 1.882.308.630,00 | 78,72% |
| 2022 | 4.694.000.000,00 | 430.060.352,00 | 9,16% |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan target penerimaan diatas terlihat realisasi penerimaan belum pernah mencapai 100%, hal ini menjadi pertanyaan apakah memang pemakaian air tanah menurun atau adanya pengawasan yang buruk terhadap pemanfaatan air tanah. Pemungutan Pajak Air Tanah, Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini UPPPD mempunyai tugas untuk melakukan penetapan Pajak Air Tanah di Satuan Pelaksana Penetapan dan Pelayanan berdasarkan hasil laporan Daftar pencatatan Meter dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah dilapangan, petugas Dinas SDA mengunjungi setiap wajib pajak untuk mencatat pemanfaatan air tanah pada meteran air yang terdaftar dan terpasang diwilayah Kebayoran Lama, perlu diketahui petugas pencatat meter

air sangat sedikit dan tidak mempunyai perwakilan pada setiap kecamatan di DKI Jakarta. Pengawasan terhadap pencatatan meteran yang tidak beroperasi sebagaimana seharusnya menciptakan dugaan bahwa pelanggan dapat dengan mudah mengelabui penggunaan air tanah. Terlihat banyak ketidakwajaran dalam penggunaan air tanah, terutama ketika dibandingkan dengan penggunaan air perpipaan yang minim atau tidak sesuai dengan perhitungan kebutuhan pelanggan.

Kewenangan air tanah DKI Jakarta telah berubah karena perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Awalnya berada di bawah pengelolaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, kemudian berpindah ke Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta dan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 sekarang berada di bawah pengelolaan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Perubahan ini memerlukan penyesuaian, migrasi data sistem, peraturan, dan transfer pengetahuan, yang tentunya memakan waktu untuk pengelolaan air tanah dan mengembalikan potensi pajak negara yang hilang, perpindahan kewenangan tersebut juga menghambat terjadinya pengumpulan dan distribusi data terhadap objek pajak yang seharusnya dapat berjalan berkelanjutan antara Bapenda dengan dinas terkait air tanah yang saat ini oleh Dinas Sumber Daya Air..

Sebelumnya telah terbit Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan menetapkan kebijakan pemerintah DKI Jakarta tentang pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan air tanah. Keputusan ini dibuat untuk mengawasi sistem prasarana sumber daya air dan pengelolaan air limbah, yang juga melibatkan pengelolaan air limbah. Pelaksanaan keputusan tersebut tidak berlangsung terhadap wilayah di tingkat bawah seperti kelurahan atau kecamatan, hanya objek potensial tertentu yang dilakukan pengawasan atas kebijakan tersebut. Diharapkan kebijakan-kebijakan pengawasan terkait air

tanah diberikan prioritas karena sangat penting guna keberlanjutan lingkungan hidup. Faktanya, sejauh ini terkait pengawasan pemanfaatan air tanah belum dapat berjalan dengan pelaksanaan secara kolaborasi. Dilansir dari berita online antaranews.com Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan kedepannya pihaknya juga akan turut melibatkan masyarakat, dari informasi tersebut diketahui bahwa kolaborasi belum terwujud antara para pemangku kepentingan. Pengawasan ini sifatnya harus berkelanjutan karena kondisi air tanah sendiri tidak nampak kasat mata, harus melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahli di bidang geologi. Pengawasan pemanfaatan air tanah tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, seperti Badan Pendapatan Daerah yang berurusan dengan penerimaan, Dinas Sumber Daya Air yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan sumber daya air, atau pun PAM yang diyakini dapat memberikan solusi terhadap layanan air bersih yang saat ini belum atau tidak maksimal dalam pendistribusian air bersih, diharapkan masyarakat juga berpartisipasi dalam pengawasan pemanfaatan air tanah, karena masyarakat sebagai pengguna dapat lebih melakukan pengendalian pemanfaatan atas air tanah, khususnya yang pemakaian berlebih dan cenderung untuk pemanfaatan komersil atau usaha.

Mengacu pada penjelasan di atas, gagasan *Collaborative Governance* yang berhubungan dengan pengawasan dalam peningkatan penerimaan dari pajak air tanah berdasarkan dengan kondisi awal berupa penjelasan mengenai keadaan awal para pelaku (pemangku kepentingan) dan interaksi di antara mereka, kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah sehingga membingungkan para aktor untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah, Pemprov DKI Jakarta perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan air tanah secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penetapan aturan yang jelas terkait penggunaan air tanah, tarif pajak yang adil, dan insentif untuk praktik konservasi air.

Diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 bahwa sebagian dari hasil pajak harus dialokasikan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pungutan pajak daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pajak Daerah ini, pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah dijamin. Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Air Tanah, dan memungkinkan aparat pemungut pajak bekerja secara profesional dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terus berusaha secara konsisten untuk meningkatkan kinerja pelayanannya, sejalan dengan harapan masyarakat terkait kewenangan daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatur pemanfaatan air tanah, bukan dengan maksud melarang atau menambah beban kepada masyarakat. Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam upaya peningkatan pajak air tanah diisi oleh banyak pemangku kepentingan dengan tugas pokok fungsinya masing-masing yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan terkait. Penyatuan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengawasan pemanfaatan air tanah serta dalam upaya peningkatan pajak air tanah tentu memerlukan langkah-langkah dan inovasi.

Kolaborasi melibatkan berbagai pihak, pemerintah daerah, lembaga pengelola sumber daya air, ilmuwan, dan masyarakat. Kepemimpinan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) memiliki peran sentral dalam membuat kebijakan yang bukan hanya memihak ke salah satu aktor tapi menguntungkan semua stakeholder, dalam penelitian ini kondisi awal pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah hanya sebatas kerjasama sesuai tugas pokok dan fungsi, perlu dijalankan secara kolaborasi. Pengawasan tersebut sangat dimungkinkan berkolaborasi melihat sejarah peran serta dari para aktor didalamnya untuk memberikan kontribusi yang relevan terhadap pengawasan pemanfaatan air tanah dan hasilnya dari pengawasan pemanfaatan air tanah, seperti database masyarakat pengguna air tanah, penerimaan pajak air tanah, dan tentunya pengelolaan air tanah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu dari permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui tata kelola pengawasan pemanfaatan air tanah berbasis *colaborative governance*, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Model kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, teridentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Wilayah Kebayoran Lama, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimal peran dan fungsi pengawasan antar instansi Pemerintah DKI Jakarta.
2. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja menyebabkan kewenangan atas pengawasan pemanfaatan air tanah berubah-ubah
3. Masih tinggi pemanfaatan air tanah dengan pengawasan rendah.
4. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air tanah dalam kaitannya dengan dampak yang diakibatkan masih sangat rendah.
5. Sumber daya manusia dan teknologi yang kurang
6. Belum terpenuhi kebutuhan air yang cukup, selain menggunakan air tanah untuk kebutuhan hidup
7. Kebijakan yang dihasilkan belum melibatkan seluruh pihak yang terlibat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini bermaksud untuk menegaskan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dirumuskan pemecahan masalah sesuai dengan tujuan penelitian. rumusan masalah difokuskan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa pengawasan pemanfaatan Pajak Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama belum optimal?

2. Bagaimana Model kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam pengawasan pemanfaatan Pajak Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengawasan pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama.
2. Mengetahui dan merumuskan model kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan model kolaborasi dalam tata kelola pengawasan pemanfaatan air tanah. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat dsterilkan di dalam konsep pembangunan dalam upaya untuk perbaikan kualitas dan kuantitas penerimaan pajak dan air tanah khususnya di Kebayoran Lama.